

Pemberdayaan Tata Kelola Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat: Implementasi Program Kuliah Kerja Lapangan Prodi Ilmu Pemerintahan dalam Mendukung Gerakan Membangun dari Desa

Jegiftha Victoria Putri Pratami Lumettu¹, Irfandi Pratama², Lulu Qurrata A'yun³,
Fanley Pangemanan⁴

^{1) - 4)} Universitas Sam Ratulangi

Email: githapratami@gmail.com

Info Artikel	ABSTRAK
<p>Riwayat artikel Dikirim : 19 November 2025 Direvisi : 24 November 2025 Diterima: 30 November 2025 Corresponding Author: Jegiftha Victoria Putri Pratami Lumettu Email: githapratami@gmail.com</p> <p>Kata Kunci: Tata Kelola Desa; Partisipasi Masyarakat; Pemberdayaan; Good Governance; KKL</p>	<p>Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui seminar bertema “Pemberdayaan Tata Kelola Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat” dilaksanakan sebagai bagian dari Program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Prodi Ilmu Pemerintahan dalam rangka memperkuat kapasitas pemerintahan desa. Latar belakang kegiatan ini berangkat dari rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya perencanaan pembangunan, serta terbatasnya kapasitas aparatur desa dalam mengelola tata kelola pemerintahan sebagaimana diidentifikasi pada desa mitra. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui observasi, dokumentasi, dan analisis respons peserta. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dinamika sosial dan kebutuhan desa secara mendalam serta menangkap makna partisipasi masyarakat secara autentik. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk seminar yang menghadirkan dua narasumber ahli dan diikuti oleh aparat desa, tokoh masyarakat, serta mahasiswa. Materi seminar mencakup penguatan konsep <i>good governance</i>, strategi peningkatan partisipasi masyarakat, hingga praktik penyusunan dokumen perencanaan desa. Hasil evaluasi peserta menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada aspek pemahaman konsep tata kelola desa, kualitas musyawarah, dan relevansi materi terhadap kebutuhan lokal. Peserta juga menunjukkan kesiapan tinggi untuk menindaklanjuti materi melalui perbaikan praktik perencanaan, transparansi anggaran, dan pelibatan warga secara lebih luas. Secara keseluruhan, kegiatan ini terbukti memberikan dampak positif dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya partisipasi sebagai fondasi tata kelola desa yang inklusif, demokratis, dan akuntabel. Seminar berbasis partisipatif menjadi strategi efektif dalam mendukung gerakan “membangun dari desa” sekaligus memperkuat kolaborasi antara akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat.</p>
	<p>ABSTRACT</p> <p>The community service activity carried out through a seminar entitled “Village Governance Empowerment Based on Community Participation” was implemented as part of the Field Work Lecture (KKL) Program of the Government Science Study Program to strengthen village governance capacity. This activity was motivated by the low level of community participation, inadequate development planning, and limited capacity of village officials in managing governance, as identified in the partner village. The method employed was a qualitative approach through observation, documentation, and participant response analysis. This approach was chosen to understand social dynamics and village needs more comprehensively, as well as to capture the authentic meaning of</p>

community participation. The activity was conducted in the form of a seminar featuring two expert speakers and attended by village officials, community leaders, and students. The seminar materials covered the strengthening of good governance concepts, strategies for enhancing community participation, and practical exercises in developing village planning documents. Participant evaluations indicated a significant increase in their understanding of village governance, the quality of community deliberations, and the relevance of the material to local needs. Participants also demonstrated strong readiness to follow up on the seminar by improving planning practices, ensuring budget transparency, and broadening community involvement. Overall, this activity proved to have a positive impact in fostering collective awareness regarding the importance of participation as the foundation of inclusive, democratic, and accountable village governance. The participatory seminar model serves as an effective strategy to support the “developing from the village” initiative while strengthening collaboration between academia, village governments, and the community

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan agenda strategis nasional yang semakin diperkuat sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini memberikan ruang yang luas bagi pemerintah desa dalam mengelola potensi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengembangkan praktik *good governance* di tingkat akar rumput. Namun, pada praktiknya, sebagian besar desa masih menghadapi berbagai kendala dalam tata kelola pemerintahan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya perencanaan pembangunan, serta terbatasnya kapasitas aparatur desa dalam menjalankan fungsi administrasi dan pelayanan publik yang efektif. Menurut (Suharyanto, 2020)), salah satu tantangan utama pembangunan desa adalah ketidaksiapan sumber daya manusia dalam mengelola kewenangan dan anggaran desa secara profesional. Analisis situasi di beberapa lokasi mitra pengabdian menunjukkan bahwa masih terdapat gap antara kebutuhan pembangunan desa dan kemampuan pengelolaan desa secara komprehensif. Permasalahan mitra terutama terkait dengan kurang optimalnya implementasi perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat, minimnya pemanfaatan data desa dalam pengambilan keputusan, serta belum terbangunnya budaya partisipasi dalam proses musyawarah maupun pelaksanaan program pembangunan. Sebagaimana dikemukakan (Mustanir & Darmiah, 2019) rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa berdampak pada ketidaksesuaian program dengan kebutuhan riil warga.

Menghadapi situasi tersebut, Program Studi Ilmu Pemerintahan berupaya memberikan solusi melalui implementasi Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang dirancang sebagai program pemberdayaan masyarakat dan penguatan tata kelola desa. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator yang membantu desa dalam mengidentifikasi masalah, menyusun prioritas pembangunan, meningkatkan literasi pemerintahan, serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pelatihan yang mendorong peningkatan kapasitas aparatur maupun masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan (Rahmawati & Kurniawan, 2021) yang menyatakan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan desa mampu memberikan kontribusi signifikan melalui transfer ilmu, pendampingan administratif, dan penguatan praktik

pemerintahan partisipatif. Secara teoritis, kegiatan pengabdian ini berlandaskan konsep *participatory governance* yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan. Partisipasi masyarakat dipandang sebagai elemen fundamental untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, demokratis, dan berkelanjutan. Menurut (Arnstein, 1969) dalam *ladder of participation*, tingkat partisipasi yang lebih tinggi akan meningkatkan efektivitas kebijakan karena masyarakat terlibat secara aktif dalam menetapkan agenda pembangunan. Teori ini relevan dengan kondisi desa mitra yang membutuhkan perubahan pola hubungan antara pemerintah desa dan warga menuju kerja sama yang lebih terbuka dan produktif.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa terbukti meningkatkan kualitas tata kelola desa, terutama dalam aspek perencanaan, digitalisasi administrasi, dan penguatan kapasitas masyarakat. Hasil studi (Prasetyo & Nugroho, 2022) memperlihatkan bahwa pendampingan mahasiswa mampu meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan data desa, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel (Prasetyo & Nugroho, 2022). Dengan demikian, implementasi KKL Prodi Ilmu Pemerintahan melalui tema “Membangun dari Desa” menjadi strategi penting dalam menjawab permasalahan mitra dan mendukung pembangunan desa secara lebih terarah. Pendekatan berbasis partisipasi masyarakat diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas tata kelola desa, tetapi juga mendorong terciptanya pemerintahan desa yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE

Metode pengabdian pada kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan memahami kondisi tata kelola desa serta dinamika partisipasi masyarakat secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial desa secara utuh dan alami melalui interaksi langsung antara fasilitator, pemateri, dan peserta. Menurut Saldaña (2021), penelitian kualitatif memungkinkan pengumpulan data yang kaya melalui proses pengamatan dan dialog intensif dengan partisipan, sehingga sangat relevan digunakan dalam kegiatan pengabdian berbasis pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini juga sejalan dengan temuan Lutfiani dan Purwanto (2020) yang menegaskan bahwa pendekatan kualitatif efektif dalam memetakan persoalan desa secara komprehensif dan melihat potensi masyarakat dari sudut pandang partisipatif.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam bentuk seminar penguatan tata kelola desa yang diselenggarakan di Desa Kinunang Kabupaten Minahasa Utara, Rabu 19 November 2025. Kegiatan menghadirkan dua pemateri utama, yaitu Dr. Maxi Egeten, S.IP., M.Si, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat, dan Dr. Fanley Pangemanan, S.Sos., M.Si, Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat. Peserta seminar merupakan aparat pemerintahan desa, tokoh masyarakat, serta mahasiswa Universitas Sam Ratulangi dengan jumlah peserta sekitar 40 orang. Komposisi peserta ini dipilih agar proses diskusi mampu merefleksikan perspektif pemerintahan, sosial, dan akademik secara bersamaan.

Materi seminar mencakup penguatan konsep *good governance*, implementasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, strategi kolaborasi aktor lokal, serta

tantangan tata kelola desa dalam konteks gerakan membangun dari desa. Selain penyampaian materi, sesi diskusi dan tanya jawab menjadi ruang penting bagi peserta untuk menggali pengalaman empiris dan berbagi praktik baik. Mahasiswa KKL turut melakukan observasi kualitatif selama kegiatan berlangsung dengan mencatat interaksi, respons peserta, serta dinamika diskusi. Hal ini sejalan dengan pandangan Mardiani (2021) bahwa observasi partisipatif pada kegiatan pemberdayaan memungkinkan peneliti atau fasilitator menangkap makna sosial dari perilaku dan pendapat masyarakat secara lebih autentik.

Instrumen penilaian dalam kegiatan pengabdian ini disusun berdasarkan pendekatan kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap proses, interaksi, serta perubahan pemahaman peserta. Instrumen utama yang digunakan adalah catatan observasi, yang dibuat oleh mahasiswa KKL dan fasilitator selama seminar berlangsung. Melalui observasi partisipatif, pengamat mencatat berbagai aspek seperti respons peserta terhadap materi, keterlibatan dalam diskusi, dinamika interaksi antara aparat desa, tokoh masyarakat, dan mahasiswa, serta perilaku non-verbal yang menunjukkan tingkat pemahaman dan minat. Catatan ini berfungsi untuk menangkap konteks sosial kegiatan secara autentik. Selain itu, penilaian juga menggunakan analisis respons peserta, yakni pengumpulan tanggapan lisan yang muncul dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Pendapat, pertanyaan, serta pengalaman nyata yang dibagikan peserta menjadi data penting untuk melihat sejauh mana seminar meningkatkan pemahaman tentang tata kelola desa dan mendorong pemikiran kritis. Instrumen ini tidak menggunakan kuesioner tertutup, tetapi lebih mengandalkan rekaman naratif dari komentar peserta selama proses berlangsung. Instrumen lainnya adalah dokumentasi, seperti foto kegiatan, rekaman video, dan notulen diskusi, yang berfungsi memperkuat temuan observasi sekaligus membantu menilai tingkat partisipasi dan suasana kegiatan. Selain itu, ringkasan hasil diskusi turut menjadi instrumen penting yang merangkum isu strategis, potensi desa, persoalan lokal, serta ide dan rekomendasi yang muncul selama seminar.

Pengukuran keberhasilan kegiatan dilakukan menggunakan teknik kualitatif melalui analisis respons peserta, catatan observasi, dokumentasi, serta ringkasan hasil diskusi. Keberhasilan dilihat dari meningkatnya pemahaman peserta mengenai konsep tata kelola desa, kemampuan aparat desa dalam mengidentifikasi persoalan lokal berbasis partisipasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan instrumen analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan mengikuti prosedur analisis kualitatif modern. Castleberry dan Nolen (2018) menegaskan bahwa proses ini penting untuk menghasilkan interpretasi yang sistematis dan valid. Senada dengan itu, Fitriani dan Susanto (2021) menambahkan bahwa analisis data kualitatif pada program pemberdayaan desa perlu mempertimbangkan konteks sosial dan perubahan perilaku masyarakat sebagai indikator keberhasilan program. Seluruh hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas seminar serta kontribusinya dalam mendukung gerakan membangun dari desa melalui penguatan tata kelola desa berbasis partisipasi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pemberdayaan Tata Kelola Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat” melalui kegiatan seminar yang melibatkan aparatur desa, tokoh masyarakat, dan mahasiswa memberikan gambaran kuat mengenai meningkatnya kapasitas tata kelola desa dan pergeseran partisipasi masyarakat menuju praktik *participatory governance* yang lebih ideal. Narasumber Dr. Maxi Egeten dan Dr. Fanley Pangemanan menyampaikan materi terkait konsep *good governance*, penyusunan dokumen perencanaan desa, serta strategi memperluas partisipasi publik dalam musyawarah desa. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan keterlibatan yang tinggi, baik dalam sesi penyampaian materi maupun diskusi interaktif.

Hasil evaluasi peserta yang disajikan secara kuantitatif pada Tabel 1 berikut memperkuat temuan bahwa seminar ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan kesiapan aparatur desa:

Tabel 1. Rekapitulasi Respons Peserta Seminar (n = 40 peserta)

Aspek Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
Pemahaman konsep <i>good governance</i> meningkat	32	8	0	0
Kualitas penyampaian materi narasumber	25	13	2	0
Keterlibatan peserta dalam diskusi	30	9	1	0
Relevansi materi dengan kebutuhan desa	28	10	2	0
Kesiapan tindak lanjut pasca seminar	26	12	2	0

Data kuantitatif pada Tabel 1 memberikan bukti yang lebih kuat bahwa kegiatan ini tidak hanya menghasilkan respons positif secara kualitatif, tetapi juga mencerminkan perubahan yang terukur. Sebagai contoh, 32 dari 40 peserta (80%) memberikan penilaian Sangat Baik terhadap peningkatan pemahaman mengenai konsep *good governance*, sedangkan sisanya memberikan penilaian Baik. Temuan ini memperlihatkan bahwa materi yang disampaikan narasumber efektif dalam menggeser pemahaman peserta dari pengetahuan dasar tentang pemerintahan desa menuju pemahaman yang lebih terstruktur mengenai prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagaimana dikemukakan oleh UNDP (1997) dalam kerangka *good governance*.

Kaitan antara hasil seminar dengan teori *participatory governance* semakin tampak pada tingginya tingkat keterlibatan peserta dalam diskusi, di mana 30 peserta (75%) menilai keterlibatan diskusi berada pada kategori Sangat Baik. Berdasarkan teori Arnstein (1969) tentang “*Ladder of Participation*”, keterlibatan aktif dalam diskusi menunjukkan adanya pergeseran dari tingkat tokenism menuju tingkat *partnership*, karena peserta tidak hanya hadir secara pasif, tetapi berkontribusi melalui pertanyaan kritis, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi bersama. Interaksi dua arah ini merupakan indikator penting bahwa forum musyawarah yang ideal, sebagai bagian fundamental dari *participatory governance*, mulai terbentuk dalam ruang seminar. Selanjutnya, Relevansi materi dengan kebutuhan desa dinilai Sangat Baik oleh 28 peserta (70%), menunjukkan bahwa materi tidak hanya teoretis, tetapi menyentuh persoalan operasional desa seperti penyusunan RPJMDes, transparansi anggaran, dan efektivitas musyawarah. Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan partisipatif menurut Chambers (1994), yang menekankan bahwa warga akan terlibat lebih aktif ketika mereka merasa bahwa proses tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dan

pengalaman mereka. Relevansi materi ini membantu mengatasi masalah klasik rendahnya partisipasi masyarakat selama ini, yang dalam banyak kasus disebabkan oleh minimnya pemahaman fungsi musyawarah, kurangnya sosialisasi, serta dominasi aparaturnya dalam proses perencanaan desa.



Gambar 1. Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan

Temuan penting lainnya adalah kesiapan tindak lanjut pasca-seminar, di mana 26 peserta (65%) menilai diri mereka Sangat Siap untuk mengimplementasikan hasil seminar, dan 12 peserta (30%) menilai Baik. Ini menunjukkan bahwa seminar tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi berhasil memicu orientasi tindakan (*action oriented capacity*). Dalam kerangka teori *capacity building* menurut Grindle (1997), kesiapan tindakan tersebut merupakan indikator bahwa peserta telah mengalami peningkatan kapasitas di tiga aspek: pemahaman (*knowledge*), kemampuan teknis (*technical skills*), dan komitmen (*motivation*). Menghubungkan temuan tersebut dengan kondisi awal desa, terlihat bahwa sebelumnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa cenderung rendah dan bersifat formalitas. Seminar ini memainkan peran sebagai mekanisme pengungkit (*leverage mechanism*) yang meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya partisipasi substantif dalam pengambilan keputusan. Ketika peserta seminar mulai menunjukkan antusiasme berdiskusi, menyampaikan pandangan, serta merencanakan tindak lanjut seperti penyempurnaan praktik musyawarah dan peningkatan keterlibatan warga, hal ini menandakan adanya pergeseran dari tata kelola desa yang berorientasi aparaturnya menuju tata kelola yang lebih kolaboratif dan partisipatif.

Secara teoritis, pergeseran ini menunjukkan peralihan dari *informative governance* menuju *interactive governance* sebagaimana dijelaskan oleh Kooiman (2003). Aparatur desa tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam perencanaan, melainkan membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan masyarakat. Forum seminar juga berfungsi sebagai ruang *learning platform* yang menciptakan *social learning process*, di mana seluruh aktor desa belajar bersama, saling bertukar pengetahuan, dan merumuskan solusi kolektif. Dengan demikian, secara keseluruhan, analisis temuan menunjukkan bahwa kegiatan seminar tidak hanya memberikan peningkatan pemahaman, tetapi juga menghasilkan perubahan perilaku, kesiapan melakukan aksi nyata, dan peningkatan kualitas interaksi sosial-politik yang

menjadi fondasi utama *participatory governance*. Jika proses ini terus dilanjutkan melalui pendampingan dan forum-forum diskusi berikutnya, maka desa berpotensi mencapai tata kelola yang semakin inklusif, akuntabel, dan demokratis sesuai prinsip *good governance* dan kerangka pembangunan berbasis masyarakat.

SIMPULAN

Kegiatan seminar pemberdayaan tata kelola desa berbasis partisipasi masyarakat yang dilaksanakan melalui Program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Prodi Ilmu Pemerintahan terbukti memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa, memperluas pemahaman masyarakat, serta menguatkan sinergi antara akademisi, pemerintah desa, dan warga. Materi yang disampaikan oleh narasumber berhasil menjawab kebutuhan mitra berdasarkan konteks permasalahan tata kelola desa, terutama terkait penguatan pemahaman prinsip *good governance*, peningkatan kualitas musyawarah desa, serta strategi mendorong partisipasi warga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan desa. Hasil evaluasi peserta menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek pemahaman konsep tata kelola desa, keterlibatan aktif dalam diskusi, dan relevansi materi dengan kebutuhan lokal. Selain itu, kesiapan tindak lanjut pasca seminar yang dinilai cukup tinggi menggambarkan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memotivasi peserta untuk melakukan perubahan nyata di tingkat desa. Proses interaksi yang intensif antara narasumber, aparatur desa, tokoh masyarakat, dan mahasiswa menciptakan ruang dialog yang konstruktif, sehingga mampu menghasilkan pembelajaran sosial yang memperkuat praktik tata kelola desa partisipatif.

Kegiatan ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa pendekatan seminar berbasis partisipatif merupakan strategi efektif dalam mendukung gerakan “membangun dari desa.” Dengan meningkatnya kesadaran, pengetahuan, dan komitmen para pemangku kepentingan desa, kegiatan ini telah memberikan fondasi kuat untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan, inklusif, dan akuntabel. Keberlanjutan kegiatan serupa sangat direkomendasikan agar proses pemberdayaan desa dapat terus berkembang dan mampu membawa dampak jangka panjang terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa di masa mendatang.

SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, disarankan agar kegiatan pengabdian ini menekankan perlunya penguatan mekanisme keberlanjutan program pasca-seminar. Pemerintah desa diharapkan mengoptimalkan hasil kegiatan melalui penyusunan rencana tindak lanjut yang terstruktur, khususnya dalam peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengembangan forum partisipatif masyarakat. Untuk mendukung tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, diperlukan upaya berkelanjutan dalam pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kemampuan administrasi aparatur desa. Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat perlu terus difasilitasi agar proses transfer pengetahuan dan praktik baik dalam tata kelola desa dapat berlangsung secara konsisten. Mahasiswa juga dianjurkan untuk terlibat dalam program-program lanjutan melalui kegiatan berbasis riset dan pendampingan, sehingga kontribusi akademik terhadap pembangunan desa dapat semakin bermakna dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Castleberry, A., & Nolen, A. (2018). Thematic analysis in qualitative research: Is it as easy as it sounds? *The Qualitative Report*, 23(6), 807–815.
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation*. Pearson.
- Mustanir, A., & Darmiah, D. (2019). Pemberdayaan masyarakat dalam penguatan pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 145–156.
- Prasetyo, R., & Nugroho, A. (2022). Penguatan tata kelola desa melalui pendampingan perguruan tinggi berbasis teknologi informasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 55–63.
- Rahmawati, F., & Kurniawan, B. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa: Peran perguruan tinggi melalui program KKN. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 25–34.
- Rahmawati, N. (2022). Penguatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 112–126.
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE Publications.
- Setiawan, B. (2021). Model pelatihan partisipatif untuk peningkatan kapasitas pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 45–60.
- Suharyanto, A. (2020). Pembangunan desa berkelanjutan di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 1–12.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme.